



KOTA BEKASI
2023

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**

**SIS VALLEN (SISTEM INFORMASI PELAYANAN VALIDASI SSPD
BPHTB ONLINE)**



Kota Bekasi

SIS VALLEN (Sistem Informasi Pelayanan Validasi SSPD BPHTB Online)

**INOVASI DAERAH
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan adanya peralihan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah, bisa terjadi perubahan yang positif baik khususnya yang berkaitan mengenai upaya peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dan optimalisasi pendapatan daerah. Dinas Pendapatan berupaya terus mencari cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Pemerintah harus terus melakukan review dan evaluasi baik dari infrastruktur, SDM maupun teknologi yang menunjang. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Kota Bekasi merasa perlu untuk mengembangkan sistem BPHTB yang telah ada untuk diterapkan pada 14 Kantor Kecamatan dan Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi.

Pengembangan BPHTB ini lebih dititik beratkan kepada pembuatan aplikasi berbasis *web* Sehingga akses data dan informasi lebih cepat sampai kepada Pihak Kantor Kecamatan maupun Pihak terkait lainnya. Dengan dikembangkannya sistem BPHTB ini diharapkan transaksi BPHTB Kota Bekasi akan semakin meningkat dan menghasilkan kualitas data yang baik untuk dapat meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain pula pada kantor pertanahan dapat dengan cepat untuk melakukan pengecekan data-data terkait dengan permohonan sertifikat dari masyarakat.

Demi menciptakan pelayanan BPHTB yang optimal, maka pemerintah Kota Bekasi menciptakan inovasi baru yaitu SIS VALLEN (Sistem Informasi Pelayanan Validasi SSPD BPHTB *Online*). Dengan adanya aplikasi SIS VALLEN proses pelayanan validasi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Antrian dalam proses validasi tidak lagi ada, sehingga dapat mengefisiensikan waktu bagi wajib pajak. Pelayanan validasi SSPD BPHTB yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dapat dilakukan secara online, sehingga akses layanan menjadi lebih mudah untuk dijangkau.

B. TUJUAN

1. Penyelenggaraan pelayanan pajak daerah secara full online (non tatap muka)
2. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak BPHTB untuk melakukan proses uji kepatuhan *validasi* SSPD BPHTB
3. Memberikan layanan pajak daerah yang cepat, efisien, mudah serta transparan

4. Mengoptimalkan pelayanan pajak daerah sehingga dapat mengungkit penerimaan pajak daerah dengan maksimal
5. Meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Bekasi terhadap pemberian layanan public
6. Mewujudkan tata kelola pajak daerah secara digital

C. MANFAAT

1. Pelayanan validasi SSPD BPHTB menjadi lebih cepat dan efektif karena dilaksanakan *full online* dan tanpa tatap muka.
2. Efisiensi anggaran cetakan formulir SSPD BPHTB, ATK serta sarana lainnya karena system ini sepenuhnya dilaksanakan secara paperless.
3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak BPHTB.
4. Mendukung paya pemerintah dalam melaksanakan pencengahan penyebaran bahaya virus covid 19 pada masa pandemi saat ini.
5. Efisiensi dari segi waktu dan biaya serta peningkatan kecepatan waktu layanan;
6. Memberikan perluasan akses pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh wajib pajak;
7. Peningkatan penerimaan sektor BPHTB sebagai sumber dana pembangunan di Kota Bekasi.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Sejalan dengan semakin berkembangnya penerapan ilmu teknologi dan informasi pada pembangunan di Indonesia, studi-studi tentang inovasi kian menarik untuk terus dikaji, terutama kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Adapun sifat-sifat ekstrinsik inovasi meliputi :

1. Kesesuaian (*compability*) inovasi dengan lingkungan setempat (baik lingkungan fisik, sosial budaya, politik, dan kemampuan ekonomis masyarakatnya).
2. Tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang ditawarkan, atau keunggulan lain yang dimiliki oleh inovasi dibanding dengan teknologi yang sudah ada yang akan diperbaharui/digantikannya, baik keunggulan teknis (kecocokan dengan keadaan alam setempat, tingkat produktivitasnya), ekonomis (besarnya biaya atau keuntungannya), manfaat non ekonomi, maupun dampak sosial budaya dan politis yang ditimbulkannya.

Adapun dalam inovasi ini, dilakukan dengan metode seefisien mungkin dan seefektif mungkin dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Proses kecepatan penciptaan inovasi daerah ini dikerjakan selama 1-3 bulan.**

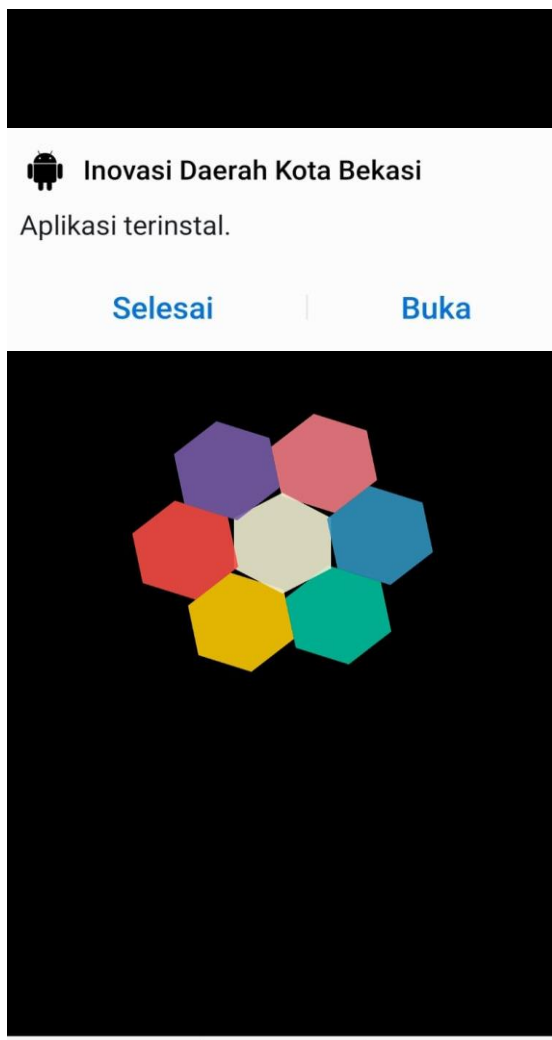
Tahapan kegiatan dalam pembentukan inovasi ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tahapan	Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang ada di masyarakat : 1. Penelitian dan Pemahaman 2. Pengumpulan Informasi 3. Analisis Masalah 4. Pernyataan Masalah												
Merancang inovasi secara detail : 1. Definisi Tujuan. 2. Ideasi dan Konsep. 3. Pemilihan Konsep. 4. Rancangan Detail 5. Prototipe dan Uji Coba. 6. Perencanaan Implementasi												
Melakukan uji coba untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas : 1. Perencanaan Uji Coba 2. Pembuatan Prototipe 3. Pemilihan Pengguna atau Sampel 4. Pelaksanaan												

<p>Uji Coba</p> <p>5. Evaluasi Hasil Iterasi dan Perbaikan</p> <p>6. Uji Coba Lanjutan (Opsional)</p> <p>7. Kesiapan Peluncuran</p>												
<p>Melakukan peluncuran inovasi :</p> <p>1. Persiapan Strategis</p> <p>2. Pengembangan Pemasaran</p> <p>3. Kesiapan Produk</p> <p>4. Komunikasi Internal</p> <p>5. Peluncuran Resmi</p> <p>6. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>7. Iterasi dan Pengembangan Lanjutan</p> <p>8. Skalabilitas dan Pertumbuhan</p>												
<p>Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi :</p> <p>1. Penetapan Kriteria Evaluasi</p> <p>2. Pengumpulan Data</p> <p>3. Analisis Data</p> <p>4. Perbaikan dan Iterasi</p> <p>5. Pemantauan Kontinu</p> <p>6. Pembelajaran dan Adaptasi</p>												

E. TIPE INFORMASI LAYANAN

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Penerapannya dapat menjadi sangat penting dan sangat membantu bagi pekerjaan manusia. Beberapa manfaat teknologi informasi antara lain mendapatkan informasi secara cepat dan mudah, efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah komunikasi. Dalam bidang perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh seorang pengguna ingin mengunjungi sebuah perpustakaan di kota tertentu, tetapi ia belum mengetahui lokasi perpustakaan tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan terkait dengan teknologi informasi dalam bidang perpustakaan adalah dengan menggunakan peta digital yang diimplementasikan melalui aplikasi *smartphone*. Dengan peta digital, setiap penggunanya dapat memakai peta yang lebih interaktif dari sekadar gulungan kertas. Kelebihan yang lain adalah pada peta digital mudah disimpan dan dipindahkan dari satu media penyimpanan ke media penyimpanan yang lain. Untuk hal itu inisiator inovasi menerapkan kemudahan layanan informasi dengan didukung aplikasi android. berikut layanan informasi dapat diakses dengan menginstal hal berikut :



F. SIGNIFIKANSI

Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan *Online* disusun sebagai sebuah inovasi pelayanan pajak daerah di Kota Bekasi dengan dampak yang dapat dirasakan oleh beberapa *stakeholder* antara lain Bagi Bapenda Kota Bekasi Pelayanan validasi SSPD BPHTB menjadi lebih cepat dan efektif karena dilaksanakan *full online* dan tanpa tatap muka, Efisiensi anggaran cetakan formulir SSPD BPHTB, ATK serta saranalainnya karena *system* ini sepenuhnya dilaksanakan secara *paperless* serta Peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak BPHTB. Sedangkan Bagi *Stakeholders* Mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan penyebaran bahaya virus covid19 pada masa *pandemic* saat ini, Efisiensi dari segi waktu dan biaya serta peningkatan kecepatan waktu layanan. Lalu manfaat bagi masyarakat antara lain memberikan perluasan akses pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh wajib pajak serta peningkatan penerimaan sektor BPHTB sebagai sumber dana pembangunan di Kota Bekasi.

G. Kontribusi Terhadap Capaian SDGs

Inovasi SIS VALLEN (Sistem Informasi Pelayanan Validasi SSPD BPHTB Online) memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan memfasilitasi proses validasi SSPD BPHTB secara online, sistem ini mengurangi kebutuhan untuk tatap muka, yang mendukung pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) dan efisiensi sumber daya, sejalan dengan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Selain itu, kemudahan akses dan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan dari SIS VALLEN berkontribusi pada SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui peningkatan penerimaan pajak yang mendukung pembangunan lokal dan infrastruktur. Dengan demikian, SIS VALLEN mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat sistem administrasi pajak dan pelayanan publik yang lebih baik.

H. Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Daerah Jawa Barat

Inovasi SIS VALLEN (Sistem Informasi Pelayanan Validasi SSPD BPHTB Online) berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja daerah Jawa Barat dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pajak daerah. Dengan mengalihkan proses validasi SSPD BPHTB ke platform online, SIS VALLEN mengurangi birokrasi dan

waktu tunggu, memungkinkan layanan yang lebih cepat dan transparan kepada wajib pajak. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga mengoptimalkan penerimaan pajak BPHTB yang menjadi sumber pendanaan penting bagi pembangunan daerah. Sistem ini juga mendukung tata kelola yang lebih baik dan paperless, mencerminkan kemajuan dalam administrasi publik dan berkontribusi pada pencapaian target kinerja daerah di Jawa Barat.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN INOVASI

Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bekasi Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebuah inovasi pelayanan pajak daerah di Kota Bekasi dengan dampak yang dapat dirasakan oleh beberapa *stakeholders* di Kota Bekasi. Pelayanan validasi SSPD BPHTB menjadi lebih cepat dan efektif karena dilaksanakan full *online* dan tanpa cetakan formulir SSPD BPHTB, ATK serta sarana lainnya.

Hal ini juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak BPHTB. Sedangkan Bagi *Stakeholders* dapat melaksanakan pencegahan penyebaran bahaya virus covid-19 pada masa pandemi saat ini, Lalu manfaat bagi masyarakat antara lain memberikan perluasan akses pelayanan pembayaran pajak serta peningkatan penerimaan sektor BPHTB sebagai sumber dana pembangunan di Kota Bekasi.

B. DESAIN INOVASI

Salah satu upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah BPHTB adalah dengan memberikan pelayanan optimal dalam validasi SSPD BPHTB sebagai mekanisme penelitian dan uji kebenaran atas penghitungan, pembayaran dan pelaporan. Dasar pelaksanaan penelitian SSPD BPHTB tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam implementasinya, Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) yang diberikan tugas untuk melaksanakan pelayanan tersebut secara aktif merumuskan strategi pelayanan valid, optimal, efektif, efisien dan menimbulkan dampak peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan BPHTB. Sebagaimana dikemukakan di atas, maka kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) *Online* merupakan salah satu strategi yang penting dan sangat relevan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah BPHTB.

Pelayanan *Validasi* Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) *Online* adalah sistem pelayanan pajak daerah khususnya pada sektor pajak BPHTB yang dibuat sebagai sebuah jawaban atas pelayanan yang prima kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Masyarakat dapat terlayani dengan baik, lebih cepat dan efisien. Aplikasi SIS VALLEN dapat menjadi model pelayanan publik di Kota Bekasi tanpa tatap muka, dan paperless sehingga dapat menjadi daya dukung Kota Bekasi sebagai *smart city* dengan tata kelola pajak daerah yang baik (Laporan Inovasi Daerah BAPPELITBANGDA, 2022).

C. PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

Inovasi daerah yang kami buat memiliki mekanisme pelayanan yang cepat dan dapat beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran baru, gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pengguna. Inovasi kami bisa menghasilkan proses hanya dalam waktu 1 hari, antara lain :

1. Aplikasi Sistem informasi pelayanan validasi SSPD BPHTB secara *online* (Sis Vallen);
2. Proses pelayanan Validasi SSPD BPHTB yang cepat, mudah dan transparan;
3. Produk Validasi SSPD BPHTB dapat diakses secara *online*.

BAB III

PENUTUP

Kegiatan inovasi Sisvalen merupakan sistem aplikasi pelayanan validasi SSPD BPHTB *Online* non tatap muka, paperless dan yang pertama kali melakukan penerbitan SSPD BPHTB secara *online* dengan menggunakan tanda tangan digital tanpa harus datang ke Badan pendapatan Daerah sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien yang memungkinkan untuk di replikasi oleh Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 30 Maret 2022 telah melakukan kunjungan ke Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan study banding tentang Digitalisasi pelayanan Pajak Daerah khususnya tentang Pelayanan Pajak BPHTB Secara *Online* yang sudah melaksanakan Cetak SSPD BPHTB secara *paperless*.

Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) *Online* (Sis Vallen) dilakukan dengan tahapan yang sudah direncanakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Melalui analisis yang dilakukan, Bapenda Kota Bekasi membutuhkan sebuah sistem pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel dari sistem pelayanan yang telah ada sebelumnya dan menjadi inovasi bagi penyelesaian masalah yang timbul. Inovasi ini dilakukan dengan mengembangkan dan membuat sistem pelayanan validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB secara *online/* non tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tercipta aplikasi pelayanan pajak daerah yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke Bapenda Kota Bekasi. Keberlanjutan inovasi ini dapat dipastikan akan dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi karena aplikasi ini sudah menjadi wadah komunikasi dan interaksi digital bagi pihak yang berkepentingan yaitu Bapenda Kota Bekasi, Wajib Pajak, PPAT/PPATS dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjaga keberlanjutan aplikasi Sis valen, antara lain :

1. Kepala Bapenda Kota Bekasi berperan dalam membuat kebijakan dan strategi dalam keberlanjutan aplikasi Sisvalen.
2. Sekretaris Bapenda Kota Bekasi sebagai pengarah dalam program sisvalen agar berjalan sesuai tupoksi yang ada.

3. Kepala Bidang Pelayanan, Pelaporan dan system Bapenda Kota Bekasi sebagai ketua dalam pelaksanaan program aplikasi sisvalen.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi membantu memfasilitasi permohonan dan Kerjasama antara Bapenda Kota Bekasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia terkait Tandatangani secara elektronik.
5. Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia merupakan Lembaga yang mengeluarkan pengesahan tandatangan elektronik yang digunakan pada aplikasi Sisvalen.
6. Wajib pajak merupakan penerima manfaat dari program aplikasi Sisvalen.
7. PPAT Notaris dan PPATS merupakan pengguna manfaat dari program aplikasi Sisvalen.
8. Tim ahli merancang *system* aplikasi Sisvalen.

Badan Pendapatan daerah Kota Bekasi juga membentuk Tim Efektif aplikasi Sisvalen. Tim merancang petunjuk teknis, *Standar Operating Prosedur* (SOP) dan Bisnis Proses Aplikasi Sisvalen.



KOTA BEKASI
2023